



---

## ***Collaborative Governance: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pengembangan Pelaku Usaha Coffe Shop di Kota Banda Aceh (Model Collaborative Umum)***

**Ahya Riwanda Muharram<sup>1\*</sup>, Salman Farisi<sup>2</sup>, Afrijal<sup>3</sup>**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email: [riwanda752@gmail.com](mailto:riwanda752@gmail.com), [salmanfarisi242@gmail.com](mailto:salmanfarisi242@gmail.com), [afrijal@usk.ac.id](mailto:afrijal@usk.ac.id)

Submitted: 05 25, 2026 | Received: 05 31, 2026 | Published: 06 02, 2026

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the government's strategy in improving the development of coffee shop businesses in Banda Aceh City through a Collaborative Governance approach. The main problem in this study is the suboptimal collaboration between stakeholders in supporting the desires and competitiveness of coffee shop businesses amidst increasingly fierce competition. The method used is a qualitative approach with literature studies, by reviewing various scientific sources such as journals, books, and relevant previous research results. The results show that coffee shop business development is influenced by internal factors such as capital, location, and income, as well as external factors such as purchasing power, raw material prices, and the level of competition. From a Collaborative Governance perspective, interactions have occurred between the government, business actors, financial institutions, and the community, but they are still informal and not yet institutionally structured. The government's role as a facilitator is very important in building synergy through training, access to financing, business digitization, and promotion of the creative economy. Therefore, strengthening collaborative institutional design is necessary to create a sustainable, adaptive, and competitive coffee shop business ecosystem in Banda Aceh City.*

**Keywords:** *collaborative governance; coffee shop; MSMEs; government strategy; Banda Aceh.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pelaku usaha coffee shop di Kota Banda Aceh melalui pendekatan collaborative governance. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha coffee shop di tengah persaingan yang semakin ketat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha coffee shop dipengaruhi oleh faktor internal seperti modal, lokasi, dan pendapatan, serta faktor eksternal seperti daya beli masyarakat, harga bahan baku, dan tingkat persaingan. Dalam perspektif collaborative governance, telah terdapat interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat, namun masih bersifat informal dan belum terstruktur secara kelembagaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting dalam membangun sinergi melalui pelatihan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan promosi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan kolaboratif agar tercipta ekosistem usaha coffee shop yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing di Kota Banda Aceh.

**Katakunci:** *collaborative governance; coffe shop; UMKM; strategi pemerintahn; Banda Aceh.*

## PENDAHULUAN

*Collaborative Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif (dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan bersama), selain itu *Collaborative Governance* juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset public. adanya keterlibatan antara pemerintahan dengan masyarakat dan dengan bantuan serta antusias dan rasa semangat pemerintah untuk mewujudkan perekonomian Indonesia lebih maju dan berkembang pesat serta dikenal di berbagai daerah bahkan negara, pemerintah menjadi peran penting untuk mensukseskan perekonomian masyarakat. (Rahmawaty et al., 2023)

Komoditas kopi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran kopi meliputi sumber pendapatan bagi petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran dan perdagangan ekspor dan impor (Nur & Ridwan, 2025). Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan. Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan. (Abdul Azis, 2022)

Secara historis di Indonesia tanaman kopi diperkenalkan pertama kali oleh VOC antara tahun 1696-1699. Awalnya, penanaman kopi hanya bersifat coba-coba (penelitian) (Sri Tjondro Winarno, 2019). Pada tahun 1875 Kopi Robusta mulai menggantikan jenis Arabika khususnya di daerah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter (di atas permukaan laut) dan mulai menyebar ke seluruh daerah baik di Jawa, Sumatera, maupun di Indonesia bagian Timur. Secara perlahan dan teratur, Indonesia bertransformasi menjadi sentra produksi Kopi terbesar di dunia. Bahkan Pada saat ini peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, ini terbukti bahwa Indonesia masuk 4 besar dalam negara pengekspor terbesar didunia dengan hasil produksi mencapai 600.000 ton. (Abdul Azis, 2022)

Keberadaan komoditas kopi dipasar domestik haruslah bersaing dengan komoditas lain yang dianggap sebagai komoditas substitusi di berbagai negara sehingga menjadi komoditas andalan yang memberikan kontribusi yang amat besar terhadap negara. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, hal ini didukung faktor luas daerah yang luas dan iklim tropis serta pasar kopi di Indonesia sangat berpotensi dalam pengembangan, hal ini didukung dari pangsa pasar dalam negeri yang masih sangat luas dan tenaga kerja yang mendukung. (Abdul Azis, 2022)

Aceh, khususnya di Takengon merupakan salah satu provinsi penghasil komoditas kopi terbesar di Indonesia memiliki banyak varian produk kopi lokal yang memiliki berbagai ciri khas berdasarkan karakteristik indikasi geografisnya. Indikasi geografis adalah sebuah sertifikasi yang dilindungi undang-undang, digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan lokasi geografis tertentu atau daerah asal. (Abdul Azis, 2022)

Perkembangan usaha coffee shop di Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat pesat. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan perubahan gaya hidup masyarakat

urban, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru berbasis sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif. Coffee shop kini berfungsi lebih dari sekadar tempat konsumsi minuman, melainkan menjadi ruang interaksi sosial, diskusi, kerja, hingga aktivitas komunitas. Kondisi ini menjadikan coffee shop sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Namun, pesatnya pertumbuhan coffee shop juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti persaingan usaha yang ketat, keterbatasan akses permodalan, standar kualitas layanan yang belum merata, legalitas usaha, hingga keterbatasan kapasitas manajerial pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, tertib regulasi, serta mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Situasi ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. (Widyarta & Tama, 2023a)

Konsep Collaborative Governance sebagaimana diperkenalkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Model ini memandang bahwa kompleksitas persoalan publik tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi multipihak yang saling berbagi peran, sumber daya, dan tanggung jawab. (Widyarta & Tama, 2023)

Dalam konteks pengembangan pelaku usaha coffee shop di Banda Aceh, collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan karena melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah kota melalui dinas terkait, komunitas pelaku usaha coffee shop, perbankan atau lembaga keuangan, komunitas kreatif, pemasok bahan baku kopi, serta konsumen sebagai bagian dari ekosistem. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan usaha, pelatihan manajemen, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, standarisasi kualitas, hingga promosi bersama berbasis potensi lokal Aceh sebagai daerah penghasil kopi berkualitas.

Penerapan model collaborative governance diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antaraktor, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta mendorong terciptanya tata kelola pengembangan UMKM yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pelaku usaha coffee shop tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada pembangunan kemitraan strategis lintas sektor. (Widyarta & Tama, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan model collaborative governance sebagai upaya meningkatkan pengembangan pelaku usaha coffee shop, serta bagaimana peran masing-masing sektor dalam mendukung terciptanya ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep collaborative governance dalam pengembangan pelaku usaha coffee shop di Kota Banda Aceh. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teoritis dan sintesis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan

penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan collaborative governance, pengembangan UMKM, dan industri coffee shop.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan literatur dari berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, jurnal nasional, serta sumber referensi lain yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian terdahulu dengan kerangka teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash yang meliputi *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi peran pemerintah serta pola kolaborasi antar aktor dalam mendukung pengembangan usaha coffee shop secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainul Ridha, Dkk (2026) keberterahan dan pengembangan usaha coffee shop di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh enam faktor utama yang terbagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan modal usaha, lokasi usaha, dan pendapatan usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi keberadaan pesaing, harga bahan pokok, dan daya beli masyarakat. Dari keseluruhan faktor tersebut, pendapatan usaha menjadi faktor internal yang paling dominan, sementara daya beli masyarakat menjadi faktor eksternal yang paling berpengaruh. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha coffee shop tidak hanya bergantung pada kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang dinamis, termasuk dampak bencana hidrometeorologi yang sempat mengganggu distribusi bahan pokok dan pasokan listrik di Banda Aceh. (Ridha et al., 2026)

Jika dianalisis dalam perspektif *collaborative governance*, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberlangsungan usaha coffee shop, meskipun belum sepenuhnya terstruktur secara formal. Pelaku usaha tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada dukungan pihak lain seperti lembaga keuangan dalam penyediaan modal, pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan stabilitas harga, serta masyarakat sebagai konsumen utama yang menjaga tingkat permintaan. Fakta bahwa sebagian besar pelaku usaha memperoleh modal dari pihak ketiga seperti perbankan serta tetap bertahannya daya beli masyarakat menunjukkan adanya interaksi dan ketergantungan antar aktor dalam ekosistem usaha coffee shop. Dengan demikian, pengembangan sektor ini secara tidak langsung telah mencerminkan praktik kolaborasi lintas sektor. (Ridha et al., 2026)

Dalam kerangka model *collaborative governance* Ansell dan Gash, kondisi awal (*starting conditions*) di Banda Aceh tergolong cukup mendukung, ditandai dengan budaya minum kopi yang kuat serta pertumbuhan jumlah coffee shop yang signifikan. Namun demikian, terdapat tantangan berupa tingginya persaingan usaha, fluktuasi harga bahan pokok, serta kerentanan terhadap bencana. Kondisi ini menuntut adanya peran pemerintah sebagai *facilitative leadership* yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan pelatihan bisnis, bantuan promosi, serta kebijakan yang mendukung stabilitas usaha, sebagaimana disarankan dalam penelitian. Akan tetapi, peran ini masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk sistem kolaborasi yang terintegrasi. (Ridha et al., 2026)



Dari sisi desain kelembagaan (*institutional design*), kolaborasi yang terjadi saat ini masih bersifat informal dan belum memiliki wadah atau forum resmi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Padahal, keberadaan forum kolaborasi sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat. Indikasi awal kolaborasi sebenarnya sudah terlihat melalui kemitraan antara coffee shop dengan UMKM lokal serta dukungan lembaga keuangan dalam penyediaan modal, namun belum didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. (Ridha et al., 2026)

Proses kolaborasi (*collaborative process*) dalam pengembangan coffee shop di Banda Aceh dapat dilihat melalui interaksi yang terus berlangsung antara pelaku usaha dan konsumen, serta antara pelaku usaha dengan mitra bisnis lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap coffee shop tetap terjaga, bahkan dalam kondisi krisis seperti bencana, yang ditunjukkan dengan tetap tingginya tingkat kunjungan dan daya beli. Selain itu, komitmen pelaku usaha juga terlihat dari upaya mereka untuk tetap beroperasi dengan menambah fasilitas seperti generator set guna mengatasi keterbatasan listrik. Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi bersama yang menjadi ciri penting dalam collaborative governance. Lebih lanjut, adanya pemahaman bersama bahwa coffee shop tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi masyarakat, memperkuat dasar kolaborasi antar aktor. (Ridha et al., 2026)

Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Widyarta & Akmal Yuda Tam, (2023) menegaskan bahwa dalam pengelolaan UMKM, pendekatan ini penting karena karakter usaha kecil seperti *coffee shop* sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, baik dari sisi regulasi, kesempatan pasar, hingga dukungan komunitas dan swasta. Collaborative Governance menggerakkan aktor-aktor ini untuk bersinergi sehingga kebijakan tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga dimengerti dan didukung secara luas oleh semua pemangku kepentingan. (Widyarta & Tama, 2023)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Nanda Amalia, Dkk (2025) menunjukkan bahwa pengembangan dan keberlanjutan pelaku usaha coffee shop di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, yaitu ketersediaan modal, lokasi usaha, pendapatan, tingkat persaingan, harga bahan pokok, serta daya beli masyarakat. Di sisi lain, tingginya pertumbuhan coffee shop dan kuatnya budaya konsumsi kopi di Banda Aceh menjadi potensi besar yang mendorong berkembangnya sektor ini. (Amalia et al., 2025)

Dalam perspektif *collaborative governance* (model umum Ansell & Gash), temuan ini mencerminkan bahwa telah terdapat interaksi antar aktor, meskipun belum terkelola secara optimal. Pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, komunitas lokal, dan masyarakat konsumen merupakan aktor-aktor penting dalam ekosistem pengembangan coffee shop. Misalnya, keterlibatan lembaga keuangan dalam penyediaan modal usaha serta peran masyarakat dalam menjaga daya beli menunjukkan adanya hubungan timbal balik antar aktor. Selain itu, peluang kolaborasi dengan komunitas lokal dan pelaku usaha lain juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing coffee shop. Hal ini menandakan bahwa praktik kolaborasi sebenarnya sudah terjadi, namun masih bersifat informal dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan yang sistematis. (Amalia et al., 2025)

Dilihat dari aspek kondisi awal (*starting conditions*), Banda Aceh memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat, seperti budaya kopi yang mengakar, meningkatnya jumlah coffee shop, serta tingginya minat masyarakat dan wisatawan terhadap kopi lokal. Namun, kondisi ini juga diiringi dengan ketimpangan kapasitas antar pelaku usaha, terutama dalam hal akses modal, kemampuan manajerial, dan pemanfaatan

teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah sebagai *facilitative leadership* yang mampu menjembatani kepentingan berbagai aktor melalui kebijakan yang mendukung, seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, serta promosi sektor ekonomi kreatif berbasis kopi. Peran ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar. (Amalia et al., 2025)

Dari sisi desain kelembagaan (*institutional design*), kolaborasi yang ada saat ini masih belum memiliki wadah formal yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Padahal, keberadaan forum kolaboratif sangat penting untuk memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan, serta menyusun strategi bersama dalam pengembangan sektor coffee shop. Sementara itu, proses kolaborasi (*collaborative process*) telah terlihat melalui adanya interaksi bisnis, kemitraan dengan pemasok lokal, serta keterlibatan komunitas dalam kegiatan promosi dan event. Kepercayaan masyarakat terhadap coffee shop juga tetap terjaga, bahkan dalam kondisi krisis seperti bencana, yang menunjukkan adanya ketahanan sosial dan ekonomi yang cukup kuat. Selain itu, inovasi yang dilakukan pelaku usaha, seperti pengembangan menu, pemanfaatan media sosial, dan peningkatan kualitas layanan, merupakan bentuk adaptasi kolaboratif terhadap perubahan lingkungan usaha. (Amalia et al., 2025)

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Afrijal, Dkk (2025) menyatakan bahwa pendekatan *collaborative governance* sangat penting dalam upaya meningkatkan pengembangan pelaku usaha *coffee shop* di Kota Banda Aceh karena model ini melibatkan multiple stakeholders seperti pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan pelaku usaha itu sendiri dalam merumuskan strategi dan pelaksanaan program pemberdayaan. Studi tentang strategi *collaborative governance* pada pengembangan UMKM mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan *cross-sectoral ecosystem* yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap pihak berkontribusi dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, serta akses pasar sehingga memperkuat kapasitas pelaku usaha untuk bersaing dan berinovasi secara berkelanjutan. (Afrijal, Nadia, Raihan Rahma Hanina, Helmi, 2025)

Selain itu, penelitian kasus di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan berbagai bentuk kolaborasi dalam pengembangan UMKM berbasis digital, termasuk gaya kolaborasi *top down*, *donor recipient*, dan *jurisdiction based*, pelaksanaan kolaboratif ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, SDM, literasi teknologi digital, serta komunikasi antar stakeholders yang kurang efektif. (Afrijal, Nadia, Raihan Rahma Hanina, Helmi, 2025)

Kajian lain yang dilakukan oleh Agus Widyarta dan Akmal Yuda Tama (2023) membahas tentang *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM pada umumnya menggarisbawahi perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah dengan sektor swasta untuk memanfaatkan teknologi digital, memperluas jejaring pemasaran, serta menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha yang tepat sasaran, agar ekosistem *coffee shop* lokal dapat tumbuh secara inklusif dan mampu mengatasi tantangan struktural dalam era persaingan global. (Widyarta & Tama, 2023)

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengadopsi model kolaboratif untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti akses pasar, pelatihan manajemen, fasilitasi izin dan permodalan, serta pendampingan teknologi pemasaran digital. Pendekatan *collaborative governance* ini mempertemukan pihak pemerintah daerah, pelaku usaha, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam suatu forum kerja bersama yang bertujuan mengidentifikasi isu dan menyusun keputusan strategis yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. (Aziza Bila, 2019)

Hasil penelitian Afrijal, Dkk, (2025) berkenaan dengan *Collaborative Governance: Strategies for Addressing Challenges and Opportunities in MSME Development* menyatakan bahwa keterlibatan multi-stakeholder seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menghasilkan ekosistem kolaboratif yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk perkembangan UMKM. Peran pemerintah bukan hanya sebagai pemberi kebijakan melainkan fasilitator utama yang memicu kolaborasi, menyediakan akses sumber daya, memperluas jaringan pasar, dan mendorong komitmen bersama antar-pemangku kepentingan. (Afrijal, Nadia, Raihan Rahma Hanina, Helmi, 2025)

Berdasarkan prinsip *collaborative governance* dan praktik di daerah lain, strategi pemerintah Kota Banda Aceh yang efektif dapat meliputi: (Afmi Apriliani, Cecep Wahyudin, Arti Hastuti, Faisal Tri Ramdani, Herli Andani, 2024)

a. Pembentukan Forum Kolaboratif

Pemerintah dapat membentuk forum yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku *coffee shop*, organisasi bisnis, serta akademisi untuk melakukan dialog, perencanaan kolaboratif, dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan *coffee shop*. Proses ini membantu membangun pemahaman bersama tentang kebutuhan usaha skala kecil.

b. Pelatihan dan Pendampingan

Pemerintah bersama sektor swasta dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, keterampilan pemasaran digital, dan inovasi produk untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Pendampingan ini merupakan wujud implementasi *governance* kolaboratif melalui pembagian tanggung jawab dalam mendukung UMKM.

c. Fasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan

Melibatkan bank lokal, lembaga mikro keuangan, dan dinas terkait dalam kerja sama untuk memberikan akses modal usaha, kredit bersubsidi, serta mempermudah perizinan sehingga *coffee shop* dapat berkembang secara legal dan terencana.

d. Penguatan Jejaring dan Akses Pasar

Kolaborasi dengan komunitas lokal, event budaya, dan platform digital dapat meningkatkan visibilitas *coffee shop* serta menarik peluang pemasaran baru. Ini merupakan langkah sinergis antar multi-stakeholder untuk mendorong keberlanjutan usaha.

Dengan menerapkan *collaborative governance*, pemerintah Kota Banda Aceh tidak hanya memperkuat ruang deliberatif dalam pembuatan keputusan, tetapi juga memperluas kesempatan pelaku usaha *coffee shop* untuk berkontribusi dalam proses pembangunan ekonomi mikro lokal. Kerja sama lintas sektor dapat membantu mengatasi hambatan klasik seperti keterbatasan modal, kurangnya kemampuan pemasaran, serta keterbatasan akses jaringan usaha.

## KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis berbagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pelaku usaha *coffee shop* di Kota Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (modal, lokasi, pendapatan) dan eksternal (daya beli masyarakat, harga bahan pokok, persaingan, serta kerentanan bencana). Temuan ini menegaskan bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh kapasitas manajerial pelaku usaha, tetapi juga oleh kondisi lingkungan usaha yang dinamis dan saling terhubung dengan aktor lain di luar pelaku usaha itu sendiri.

-----  
*Collaborative Governance: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pengembangan Pelaku Usaha Coffe Shop di Kota Banda Aceh (Model Collaborative Umum)*

(Riwanda Muharram, et al.)

Dalam perspektif *collaborative governance* menurut Chris Ansell dan Alison Gash, ekosistem *coffee shop* di Banda Aceh telah menunjukkan indikasi praktik kolaborasi lintas aktor, meskipun masih berlangsung secara informal. Interaksi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, pemasok lokal, komunitas, konsumen, serta pemerintah daerah memperlihatkan adanya ketergantungan dan hubungan timbal balik yang menjadi ciri utama kolaborasi. Namun, kolaborasi tersebut belum terwadahi dalam desain kelembagaan yang formal, terstruktur, dan berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini masih cenderung normatif sebagai regulator, sementara peran sebagai *facilitative leadership* belum sepenuhnya optimal. Padahal, pemerintah memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak melalui pembentukan forum kolaboratif, penyediaan pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi, fasilitasi akses permodalan, stabilisasi harga bahan baku, serta promosi ekonomi kreatif berbasis kopi Aceh. Tanpa penguatan peran fasilitatif ini, potensi besar budaya kopi dan pertumbuhan *coffee shop* di Banda Aceh belum dapat dimaksimalkan secara kolektif.

Dengan demikian, strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pelaku usaha *coffee shop* perlu diarahkan pada penguatan *institutional design* kolaborasi, pembentukan wadah komunikasi multipihak, serta pengembangan proses kolaboratif yang berlandaskan kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama. Pendekatan *collaborative governance* yang terstruktur akan mampu menciptakan ekosistem usaha yang partisipatif, adaptif terhadap krisis, serta berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, R. (2022). STRATEGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BERBASIS EKONOMI KREATIF PENGOLAHAN KOPI KABUPATEN ACEH TENGAH. *Eduonomika*, 06(01), 95–101. file:///C:/Users/USER-IC/Downloads/460923-none-ea832f0f.pdf
- Afmi Apriliani, Cecep Wahyudin, Arti Hastuti, Faisal Tri Ramdani, Herli Andani, S. S. I. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 2550–1143.
- Afrijal, Nadia, Raihan Rahma Hanina, Helmi, N. K. (2025). Collaborative Governance : Strategies for Addressing Challenges and Opportunities in MSME Development. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 3(1), 1–17.
- Amalia, C. N., Ibrahim, A. L., & Furqansyah, M. D. (2025). Strategi Bertahan di Tengah Persaingan : Analisis SWOT Usaha Coffee Shop Bara Kopi di Kota Banda Aceh. *Jurnal Agribisnis Unisi*, 14(1), 38–44. file:///C:/Users/USER-IC/Downloads/agribisnis,+38-44.+Cut+Nanda.pdf
- Aziza Bila, B. S. (2019). Collaborative governance dalam pemerintahan 1 collaborative governance strategy in government sector. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 9(2), 196–210.
- Dwiyanto, A. (2017). Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja*, 5(1), 10–27
- Hidayat, T. (2018). Sinergitas aktor dalam collaborative governance pengembangan UMKM. *Jurnal Administrasi Publik (JAP Universitas Brawijaya)*, 6(3), 210–225.
- Kurniawan, R. (2019). Peran stakeholder dalam collaborative governance: Pendekatan actor-network.

-----  
*Collaborative Governance: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pengembangan Pelaku Usaha Coffe Shop di Kota Banda Aceh (Model Collaborative Umum)*

(Riwanda Muharram, et al.)



- Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP Universitas Lampung), 9(2), 89–104.
- Lestari, P. (2022). Akuntabilitas dalam collaborative governance: Tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 8(1), 32–50.
- Mulyadi, D. (2018). Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(3), 136–153.
- Nasution, Z. (2020). Implementasi collaborative governance pada UMKM daerah: Analisis praktik. *Jurnal Perspektif Administrasi*, 7(4), 301–319
- Nur, I., & Ridwan, M. (2025). Kolaborasi dalam Pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( UMKM ) Kopi di Desa Dokan Kabupaten Karo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2245–2260.
- Pramusinto, A. (2019). Collaborative governance dalam penguatan ekonomi lokal: Studi kasus di sektor UMKM. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP UGM)*, 4(2), 78–93
- Purwanti, N. (2016). Collaborative governance dalam kebijakan publik: Tinjauan konsep dan implementasi. *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 115–130
- Putra, A. (2020). Strategi pengembangan UMKM berbasis kemitraan dan kolaborasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB Universitas Brawijaya)*, 14(1), 75–92.
- Rahman, F. (2021). Digitalisasi UMKM dalam perspektif collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 145–162.
- Rahmawaty, L., Mulyani, N. S., Faturrahman, T., & Rahmawati, N. (2023). Collaborative Governance Strategy In Developing Micro , Small And Medium Enterprises ( Msmes ) Using The Pentahelix System Collaborative Governance Strategy In Developing Micro , Small And Medium Enterprises ( Msmes ) Using The Pentahelix. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(23), 132–140.
- Ridha, A., Maulida, Z., & Astuti, I. N. (2026). Analisis Faktor-Faktor Kebertahanan Pengusaha Coffee Shop di Banda Aceh Karena Dampak Bencana Hidrometeorologi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 13017–13023.
- Sabaruddin, A. (2015). Model collaborative governance dalam pengelolaan UMKM di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 3(1), 45–61.
- Widyarta, A., & Tama, A. Y. (2023a). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5103–5107.
- Widyarta, A., & Tama, A. Y. (2023b). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 132–147.
- Yoserizal & Yudiatmaja. (2016). Collaborative governance dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lokal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 55–72